



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦠꦺꦴꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦶꦢꦺꦴꦫꦺꦴꦗ

Bolodukuh Lor, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul 55892

Posel : desasidorejoponjong@gmail.com Laman : www.sidorejo-ponjong.desa.id

Nomor : 100.3.5.5/37/2026
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LPP Kalurahan
Akhir Masa Jabatan

Sidorejo, 30 Juni 2026

Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala DPMKPPKB
Kabupaten Gunungkidul
di
Gunungkidul

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 huruf b pada Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajiban Lurah, salah satu kewajiban Lurah yakni menyusun dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Sehubungan dengan akan berakhirnya Masa Jabatan kami sebagai Lurah Sidorejo Kapanewon Ponjong masa bhakti 2018 - 2026, maka dengan ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati Gunungkidul, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Sidorejo Kapanewon Ponjong Periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.



Lurah Sidorejo,

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada:

1. Panewu Ponjong;
2. Ketua Bamuskal Sidorejo.

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat pasal 92 huruf b pada Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Lurah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati. Disamping itu, Lurah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan kalurahan meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan kalurahan antara lain :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul kalurahan;
- b. kewenangan lokal berskala kalurahan;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh :
 - 1) Pemerintah;
 - 2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) Pemerintah Kabupaten.
- d. kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/120/PG/KPTS/2018 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji Kepala Desa tanggal 26 November 2018, maka masa jabatan kami sebagai Lurah Sidorejo akan berakhir dalam beberapa bulan yang akan datang. Dengan akan berakhirnya Masa Jabatan Lurah periode tahun 2018 – 2026 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPP Kalurahan) Akhir Masa Jabatan Lurah, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan oleh Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang belum jelas. Apabila di kemudian hari diperlukan penjelasan lebih lanjut kami selaku Lurah siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan kalurahan.

Semoga LPP Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Sidorejo ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Sidorejo, 25 Juni 2026
Lurah

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR
KATA PENGANTAR.....1
DAFTAR ISI.....2
BAB I4
PENDAHULUAN.....4
1.1. LATAR BELAKANG.....4
1.2. DASAR HUKUM.....5
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN6
1.4. RUANG LINGKUP LAPORAN6
1.5. GAMBARAN UMUM KALURAHAN.....7
 a. GEOGRAFIS7
 b. DEMOGRAFIS7
 c. PEMERINTAHAN KALURAHAN9
1.6. KONDISI EKONOMI.....12
 a. POTENSI KALURAHAN12
 b. PERTUMBUHAN EKONOMI.....19
BAB II20
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN.....20
2.1. VISI DAN MISI.....20
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KALURAHAN.....21
2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN22
 a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN.....22
 b. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN22
 c. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN SIDOREJO23
 d. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN.....23
BAB III24
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN.....24
3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN.....24
 a. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN24
 b. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....27
3.2. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN.....27
 a. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN KALURAHAN27
 b. TARGET DAN REALISASI BELANJA28
3.3. PEMBIAYAAN31
3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN31
BAB IV.....31
CAPAIAN PROGRAM.....31

4.1.	Capaian Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	31
4.2.	Capaian Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan	33
4.3.	Capaian Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35
4.4.	Capaian Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat	36
BAB V		37
RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN		37
BAB VI		39
PRESTASI		39
6.1.	INFRASTRUKTUR KALURAHAN	39
6.2.	PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	39
6.3.	EKONOMI	39
6.4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40
6.5.	PRESTASI BIDANG LAINNYA	40
BAB VII		41
PENUTUP		41
7.1	KESIMPULAN	41
7.1	SARAN-SARAN	41

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN AKHIR MASA JABATAN LURAH PERIODE TAHUN 2018-2026 KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Sidorejo selama periode 2018 - 2026 yang dipimpin oleh Lurah Sidorejo menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang akan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, dan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Kewajiban Lurah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kalurahan merupakan bentuk pertanggungjawaban Lurah selaku pimpinan Pemerintahan Kalurahan, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat diketahui oleh Bupati, Panewu, Bamuskal dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan kalurahan dan pembangunan kalurahan sesuai kewenangan kalurahan, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan adalah laporan yang dibuat oleh Lurah mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan (Lurah dan Pamong Kalurahan) dan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait (Bupati, Panewu, Bamuskal dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Lurah.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
- k. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
- l. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020;
- m. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
- n. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- o. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- p. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan;
- q. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
- r. Peraturan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Kalurahan (khususnya Lurah) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kalurahan kepada *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Panewu dalam menilai kinerja Pemerintah Kalurahan (khususnya Lurah) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
 - 2). Anggota Bamuskal dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan melakukan upaya bersama-sama Lurah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkankinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan duniausaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

1.4. RUANG LINGKUP LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan akhir masa jabatan disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan akhir masa jabatan antara lain:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan selama masa jabatan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahanselama masa jabatan kepada Bupati melalui Panewu sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 5 tahun dan 6 bulan yang telah dilaksanakan.

- b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatandijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Lurah;
- 2). program dan potensi kalurahan yang perlu dikembangkan;
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

a. GEOGRAFIS

1). Luas Kalurahan

Kalurahan Sidorejo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 200-400 meter diatas permukaan laut yang merupakan wilayah Kapanewon Ponjong. Curah hujan di Kalurahan rata-rata 1.954,43 mm/tahun dengan luas wilayah Kalurahan 1.315 Ha, terbagi dalam 19 Padukuhan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan		Luas Wilayah
1.	Asemlulang	:	59 Ha
2.	Blarangan	:	67 Ha
3.	Bolodukuh Kidul	:	87 Ha
4.	Bolodukuh Lor	:	63 Ha
5.	Dadap	:	51 Ha
6.	Gunungkrambil	:	74 Ha
7.	Munggur Kulon	:	59 Ha
8.	Munggur Wetan	:	55 Ha
9.	Ngampel	:	63 Ha
10.	Ngrawan	:	89 Ha
11.	Nongkosepet	:	47 Ha
12.	Poko	:	82 Ha
13.	Sambirejo	:	66 Ha
14.	Sumberwojo	:	88 Ha
15.	Tegalrejo	:	78 Ha
16.	Trengguno Kidul	:	83 Ha
17.	Trengguno Lor	:	70 Ha
18.	Trengguno Wetan	:	69 Ha
19.	Turi	:	65 Ha

Sumber Data: Data Tanah Desa

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Sidorejo sebagai berikut:

- Utara : Kalurahan Ngipak (Kapanewon Karangmojo)
- Timur : Kalurahan Ponjong
- Selatan : Kalurahan Gombang
- Barat : Kalurahan Ngeposari(Kapanewon Semanu)

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan kalurahan

- Jarak dari pusat pemerintah Kapanewon : 4 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 12 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 50 Km

b. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Sidorejo pada akhir tahun 2018 sejumlah 9.603 Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 4.802 jiwa dan perempuan sejumlah 4.801 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk per semester II Tahun 2025 sejumlah 9.694 Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 4.832 jiwa dan perempuan sejumlah 4.862 Jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Sidorejo per Padukuhan pada akhir tahun 2018 dan per akhir 2025 seperti tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan	Akhir 2018			Akhir 2025		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Asemblulang	213	220	433	221	231	452
2.	Blarangan	291	314	605	297	304	601
3.	Bolodukuh Kidul	181	199	380	192	197	389
4.	Bolodukuh Lor	260	268	528	258	275	533
5.	Dadap	96	99	195	99	105	204
6.	Gunungkrambil	420	424	844	416	423	839
7.	Munggur Kulon	99	99	198	101	104	205
8.	Munggur Wetan	110	122	232	112	132	244
9.	Ngampel	368	392	760	375	395	770
10.	Ngrawan	139	136	275	153	154	307
11.	Nongkosepet	253	239	492	255	245	500
12.	Poko	315	301	616	308	310	618
13.	Sambirejo	291	307	598	293	311	604
14.	Sumberwojo	148	139	287	147	135	282
15.	Tegalrejo	330	312	642	327	321	648
16.	Trengguno Kidul	331	325	656	324	329	653
17.	Trengguno Lor	351	328	679	357	333	690
18.	Trengguno Wetan	266	255	521	264	241	505
19.	Turi	340	322	662	333	317	650

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2025 (Dukcapil)

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada akhir tahun 2018 Pendidikan sebagian besar penduduk Kalurahan Sidorejo pada umumnya adalah tamat SD/sederajat. Dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun terakhir banyak penduduk Kalurahan Sidorejo yang menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Data perbandingan tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong pada akhir tahun 2018 dan per akhir 2025 sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	Tahun 2018	Tahun 2025
1)	Tidak/belum sekolah	2.153 orang	2.054 orang
2)	Taman Kanak-kanak	951 orang	951 orang
3)	Sekolah Dasar/ sederajat	2.693 orang	2.439 orang
4)	SLTP / sederajat	2.003 orang	2.087 orang
5)	SMA/sederajat	1.588 orang	1.879 orang
6)	Akademi/D1-D3	80 orang	96 orang
7)	Sarjana	126 orang	183 orang
8)	Pasca Sarjana	4 orang	5 orang

Sumber data : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2025 (Dukcapil)

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kalurahan Sidorejo bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani

Secara umum, data penduduk berdasarkan mata pencaharian pada akhir tahun 2018 dan per 30 Juni 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

No	Mata pencaharian	Tahun 2018	per 30 Juni 2026
1)	Karyawan :	712 orang	731 orang
	a) Pegawai Negeri Sipil	50 orang	52 orang

	b) TNI/Polri	10 orang	11 orang
	c) Swasta	652 orang	668 orang
2)	Wiraswasta/pedagang	528 orang	545 orang
3)	Petani	2251 orang	2259 orang
4)	Tukang	12 orang	16 orang
5)	Buruh Tani	180 orang	187 orang
6)	Pensiunan	50 orang	52 orang
7)	Nelayan	1 orang	1 orang
8)	Peternak	0 orang	0 orang
9)	J a s a	0 orang	0 orang
10)	Pengrajin	0 orang	0 orang
11)	Pekerja seni	0 orang	0 orang
12)	Lainnya	4197 orang	1534 orang
13)	Tidak bekerja/ penganggur	1662 orang	1675 orang

Sumber data : Monografi Kalurahan semester II 2018 dan semester I 2026

c. PEMERINTAHAN KALURAHAN

1). DataLurah dan Pamong Kalurahan

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Sidiq Nur Saff'i	Gunungkidul, 21-11-1988	Lurah	S-1
2.	Mega Nur Pratiwi	Gunungkidul, 22-07-1993	Carik	S-1
3.	Nining Setyawati	Gunungkidul, 09-09-1981	Jagabaya	S-1
4.	Budi Susanto	Gunungkidul, 13-04-1989	Ulu-Ulu	S-1
5.	Kastu	Gunungkidul, 15-07-1978	Kaur Tata Laksana	SLTA
6.	Haris Mahasibi	Gunungkidul, 20-07-1991	Kaur Danarta	SLTA
7.	Garnis Sukmadewi	Gunungkidul, 30-07-1993	Kaur Pangripta	SLTA
8.	Henny Tri Kurnia Putri	Gunungkidul, 13-02-1995	Kamituwa	D-3
9.	Fitri Cahyanto	Gunungkidul, 05-04-1992	Dukuh Gunungkrambil	S-1
10.	Siti Rokhani	Gunungkidul, 06-03-1986	Dukuh Tegalrejo	SLTA
11.	Agus Tuhono	Semarang, 07- 08-1868	Dukuh Munggur Kulon	SLTA
12.	Suprapti	Gunungkidul, 13-06-1979	Dukuh Blarangan	S-1
13.	Aris Nuriyanto	Gunungkidul, 01-01-1977	Dukuh Sambirejo	D-3
14.	Amin Nugroho	Gunungkidul, 31-01-1981	Dukuh Bolodukuh Lor	D-3
15.	Desita Soviana Putri	Gunungkidul, 24-12-1997	Dukuh Bolodukuh Kidul	S-1
16.	Yuly Nandianto	Gunungkidul, 05-07-1996	Dukuh Sumberwojo	SLTA
17.	Kasiran	Gunungkidul, 23-04-1974	Dukuh Ngrawan	SLTA

18.	Mahesa Dwi Akso	Gunungkidul, 01-11-2001	Dukuh Poko	SLTA
19.	Sumilan	Gunungkidul, 01-05-1969	Dukuh Trengguno Lor	SLTA
20.	Didik Antoro	Gunungkidul, 05-02-1991	Dukuh Trengguno Kidul	SLTA
21.	Nurlaila Runiheti S	Gunungkidul, 31-05-1983	Dukuh Trengguno Wetan	D-3
22.	Subarno	Gunungkidul, 27-10-1970	Dukuh Ngampel	SLTP
23.	Irvan Alex Pambudi	Gunungkidul, 10-02-2000	Dukuh Asemblulang	SLTA
24.	Sukaryanto	Gunungkidul, 01-10-1986	Dukuh Nongkosepet	SLTP
25.	Fajar Suharyanto	Gunungkidul, 14-02-1991	Dukuh Turi	SLTA
26.	Tety Habsari Setiono	Gunungkidul, 08-01-1993	Dukuh Munggur Wetan	S-1
27.	Nasrudin Ahmad Sholeh	Gunungkidul, 28-12-1997	Dukuh Dadap	SLTA
28.	Saidi	Gunungkidul, 15-04-1970	Staf Pamong	SLTA
29.	Suharyono	Gunungkidul, 08-11-1968	Staf Pamong	SLTA
30.	Surojo	Gunungkidul, 25-05-1967	THL Petugas Kebersihan	SLTP

Sumber Data: Daftar Pamong Kalurahan Sidorejo Tahun 2025

2). **Data Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)**

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Suwarno, S.E	Gunungkidul, 16-08-1974	Ketua	S1
2.	Soleh Hidayat, S.Pt	Gunungkidul, 14-06-1979	Wakil Ketua	S1
3.	Riyanti	Gunungkidul, 30-06-1983	Sekretaris	SMA
4.	Arkam	Gunungkidu, 19-08-1971	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	SMP
5.	Sudardi	Gunungkidul, 15-03-1968	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
6.	Suryanto	Gunungkidul, 10-03-1978	Anggota	SMA
7.	Irsad	Gunungkidul, 11-03-1978	Anggota	SMP
8.	Dwi Susanto	Gunungkidul, 16-10-1976	Anggota	SMP
9.	Edi Supriyono	Gunungkidul, 03-02-1984	Anggota	SMA

Sumber Data: Data Bamuskal

3). **Data Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan**

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Ketua I	Anisa Nurdani	Trengguno Lor

2.	Ketua II	Suparti	Bolodukuh Lor
3.	Ketua III	Hartatik	Asemblulang
4.	Sekretaris I	Hartuti Jati Ningrum	Munggur Kulon
5.	Sekretaris II	Arum Sari	Ngampel
6.	Sekretaris III	Sumarsih	Blarangan
7.	Bendahara I	Nining	Trengguno Wetan
8.	Bendahara II	Sulasmi	Nongkosepet
9.	Bendahara III	Eka Sepsi Setiasari	Sumberwojo
10.	Ketua Pokja I	Harminah	Dadap
11.	Sekretaris Pokja I	Sudarwati	Sambirejo
12.	Bendahara Pokja I	Mujiyem	Trengguno Lor
13.	Anggota	Anik Suwarni	Trengguno Lor
14.	Anggota	Sukini	Asemblulang
15.	Anggota	Suryaningsih	Ngrawan
16.	Anggota	Sri Subaryati	Bolodukuh Kidul
17.	Ketua Pokja II	Suprapti	Blarangan
18.	Sekretaris Pokja II	Sugiyarti	Gunungkrambil
19.	Bendahara Pokja II	Sugiyanti	Blarangan
20.	Anggota	Endang Sundari	Turi
21.	Anggota	Musilah	Munggur Wetan
22.	Anggota	Etik Etikawati	Sumberwojo
23.	Anggota	Rubiyem	Asemblulang
24.	Anggota	Anik Purnawati	Trengguno Kidul
25.	Ketua Pokja III	Triyani	Nongkosepet
26.	Sekretaris Pokja III	Suwanti	Nongkosepet
27.	Bendahara Pokja III	Sri Tulatmini	Poko
28.	Anggota	Suryani	Turi
29.	Anggota	Srini	Munggur Kulon
30.	Anggota	Dwi Agustinie	Poko
31.	Anggota	Hening Rubiyati	Tegalrejo
32.	Ketua Pokja IV	Suprihatun	Bolodukuh Lor
33.	Sekretaris Pokja IV	Wastini	Trengguno Wetan
34.	Bendahara Pokja IV	Mursinah	Turi
35.	Anggota	Sawilah	Ngampel
36.	Anggota	Tukiyem	Ngampel
37.	Anggota	Ismiyatun	Bolodukuh Lor

38.	Anggota	Tri Sakti	Tegalrejo
-----	---------	-----------	-----------

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Ketua I	Wasidi	Gunungkrambil
2.	Ketua II	Agus Indriedi	Tegalrejo
3.	Sekretaris	Supriyono	Sambirejo
4.	Bendahara I	Sagiman	Blarangan
5.	Seksi Prasarana	Sujono	Trengguno Kidul
6.	Seksi Perekonomian I	Suratman	Bolodukuh Lor
7.	Seksi Kesra I	Mugi Kahono	Trengguno Wetan
8.	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban I	Suharno	Asemlulang
9	Seksi Pemberdayaan Perempuan I	Sugeng Suhartono	Ngrawan
10	Seksi Pemuda Olahraga Dan Kesenian	Wasiman	Poko

c. Karang Taruna

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	1. Nasrudin Ahmad Sholeh 2. Dopi Budihanto	Dadap Trengguno Kidul
2	Sekretaris	1. Mahesa Dwi Akso 2. Adhitiya Yogy	Poko Sumberwojo
3	Bendahara	1. Arum Izzawati 2. Tri Ambar Lestari	Munggur Kulon Dadap
4	Bidang Pemuda Dan Olahraga	1 Triawan 2 Sulasno	Ngampel Turi
5	Bidang Keagamaan	1. Alwi.S 2. Muhammad Ichsan	Sumberwojo Bolodukuh Kidul
6	Bidang Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	1. Rohmadi 2. Ibnu Ardana 3. Tri Astuti	Turi Turi Dadap

1.6. KONDISI EKONOMI

a. POTENSI KALURAHAN

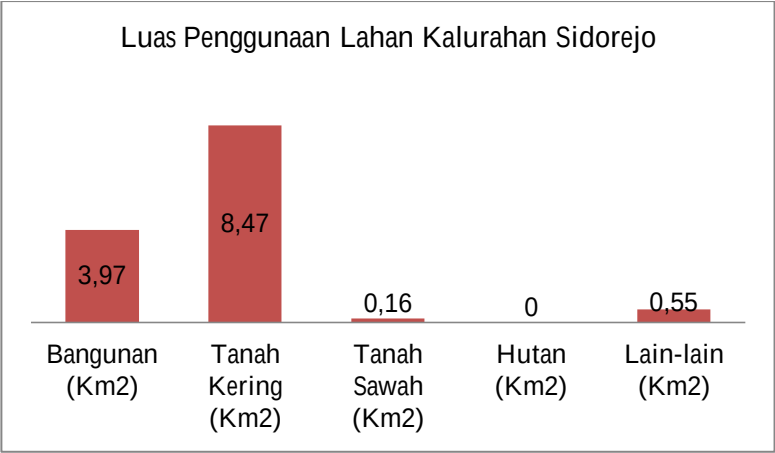
Adapun potensi atau kekuatan dari Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kalurahan Sidorejo 13,15 Km2 atau 12,6 % dari total wilayah Kapanewon Ponjong (BPS, 2024), sehingga mempunyai potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.

Wilayah Kalurahan Sidorejo terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-400 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 66% wilayah Ponjong

merupakan tanah kering sementara luas tanah sawah kurang dari 7%. Dari total lahan sawah yang digunakan 30% merupakan lahan tadah hujan. Lahan sawah hanya dilakukan pada saat musim penghujan, sedangkan lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani palawija dengan pola tumpang sari/tumpang gilir. Adapula lahan tegal yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/tanaman jangka panjang. Data serta Luas penggunaan lahan di Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut :



Grafik 1. Luas Penggunaan Lahan Kalurahan Sidorejo

Dengan luas lahan sebagian besar adalah tanah kering menjadi potensi dan juga tantangan bagi petani di Kalurahan Sidorejo. Pemilihan komoditas oleh petani menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha tani, mengingat lahan kering di Kalurahan Sidorejo sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Selain pemilihan komoditas, sistem budidaya yang dipilih juga akan mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini menjadi penting bagi petani di Sidorejo mengingat lahan kering lebih rentan terjadi gagal panen.

Berdasarkan data BPS Gunungkidul tahun 2024, curah hujan tahunan di Gunungkidul adalah 2450 mm termasuk kategori sedang. Curah hujan memiliki hubungan erat dengan pertanian karena berperan penting dalam ketersediaan air untuk tanaman, tetapi curah hujan ekstrem (terlalu tinggi atau rendah) dapat merusak atau menurunkan produktivitas pertanian. Curah hujan yang cukup mendukung pertumbuhan tanaman, mengisi irigasi, dan keberlanjutan sawah tadah hujan, sementara curah hujan berlebih dapat menyebabkan banjir, erosi, penyakit tanaman, dan gagal panen, sedangkan curah hujan terlalu sedikit menyebabkan kekeringan yang mengancam produksi.

Potensi pertanian dalam arti luas, termasuk didalamnya tanaman pangan, tanaman buah-buahan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Potensi tanaman pangan di Kalurahan Sidorejo yang menjadi andalan ada padi dan jagung. Sekitar 600 Ha lahan di Sidorejo ditanami padi dengan produksi 2-8 ton/ha. Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Sidorejo adalah kelapa, luas lahan produksi sekitar 2 ha dengan hasil produksi sekitar 2 ton/ha.

Tabel Hasil dan Luas Produksi Tanaman Pangan Kalurahan Sidorejo

Jenis Tanaman Pangan	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi
Jagung	100	5,00 Ton/ha
Cabe	15	10,00 Ton/ha
Bawang Merah	10	0,50 Ton/ha

Tomat	1	50,00 Ton/ha
Kacang kedelai	5	7,00 Ton/ha
Terong	0,5	15,00 Ton/ha
Kangkung	1	16,00 Ton/ha
Padi sawah	200	8,00 Ton/ha
Padi lading	400	2,00 Ton/ha
Ubi kayu	10	2,00 Ton/ha

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan, Prodeskel Sidorejo 2025

Tabel Hasil Dan Luas Produksi Tanaman Buah-Buahan Kalurahan Sidorejo

Nama Komoditas	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Jambu Mete	0,5000	1,0000
Alpokot	0,5000	1,0000
Mangga	5,0000	3,0000
Pepaya	0,5000	4,0000
Pisang	2,0000	3,0000
Jambu air	1,0000	2,0000
Nangka	1,0000	2,0000
Jambu klutuk	1,0000	2,0000

Dari sektor kehutanan, jenis komoditas kayu yang banyak ditanam oleh masyarakat antara lain jati, sengon, mahoni dan bambu. Selain itu ada juga masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan untuk produksi arang.

Dalam bidang peternakan, jenis ternak yang paling banayak dimiliki masyarakat Sidorejo adalah ayam kampung, diikuti kambing dan juga sapi. Selain hewan ternak untuk dijual belikan, dari hasil usaha peternakan juga dihasilkan daging dan telur. Berikut adalah data jenis, jumlah pemilik dan perkiraan jumlah populasi ternak di Kalurahan Sidorejo.

Tabel Jenis Ternak di Kalurahan Sidorejo

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	500 orang	835 ekor
Kerbau	39 orang	39 ekor
Babi	2 orang	11 ekor
Ayam kampung	3000 orang	15500 ekor
Jenis ayam broiler	5 orang	1500 ekor
Bebek	25 orang	2000 ekor
Kambing	1300 orang	2800 ekor
Domba	75 orang	250 ekor
Angsa	200 orang	400 ekor

Di sektor perikanan, terdapat tiga telaga yang digunakan untuk usaha pemancingan yaitu telaga Poko, telaga Trengguno dan telaga Sumber Temon Tegalrejo. Selain itu, usaha ternak ikan lele dan ikan nila juga dibudidayakan oleh masyarakat di beberapa padukuhan di Sidorejo.

Bahan galian industri antara lain batu kapur, batu pasang, batu putih. Padukuhan Nongkosepet dan Turi adalah dua padukuhan di Sidorejo yang

menjadi pusat industri bahan galian di Sidorejo. Terdapat satu perusahaan di padukuhan Turi yaitu PT. Caldomil yang merupakan perusahaan batu kapur yang cukup besar. Selain itu mayoritas usaha bahan galian di Sidorejo adalah merupakan usaha dengan skala kecil.

Ketersediaan sumber air bawah tanah yang cukup antara lain bagi kebutuhan pertanian, perkebunan dan perikanan darat. Untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian terdapat 9 (sembilan) sumur bor mata air dalam, dan 7 (tujuh) titik sumur irigasi perpompaan. Sumber air bersih berasal dari air sumur, sumur pompa, PDAM dan sumber mata air. Adapun sumur pompa mata air dalam yang ada di Sidorejo yang digunakan untuk usaha pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Sumur Pompa Sumberwojo
- b. Sumur Pompa Sambirejo 1
- c. Sumur Pompa Sambirejo 2
- d. Sumur Pompa Blarangan
- e. Sumur Pompa Bolodukuh lor
- f. Sumur Pompa Bolodukuh kidul
- g. Sumur pompa Ngampel
- h. Sumur pompa Trengguno lor
- i. Sumur Pompa Munggur Kulon

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk 9694 jiwa dengan presentase penduduk usia produktif (range 15 tahun sampai 59) sebanyak 65,28% merupakan potensi tenaga kerja, dengan jenis pekerjaan tertinggi adalah petani/pekebun dengan jumlah 2.446 atau menyerap 25,32% dari total penduduk Kalurahan Sidorejo.



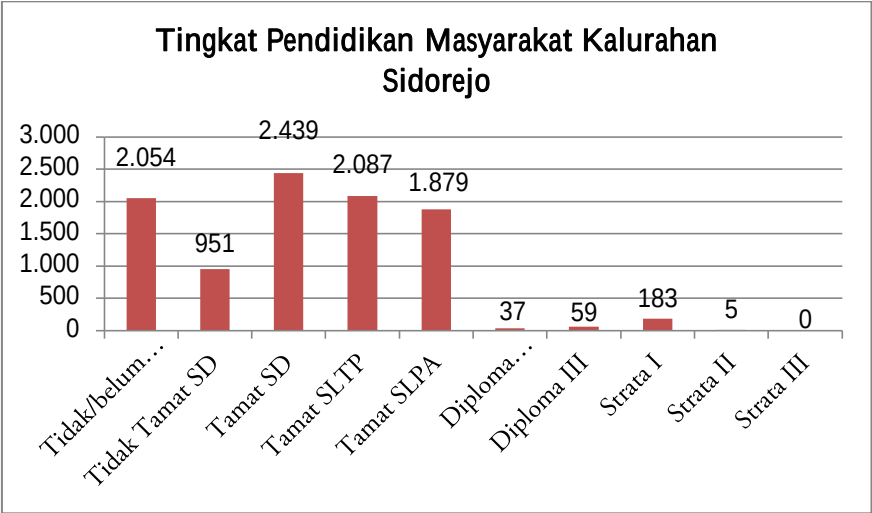
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Sidorejo

Secara keseluruhan golongan usia di Kalurahan Sidorejo didominasi oleh usia produktif yaitu 15-59 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 6.328 jiwa atau 65,28% dari total penduduk. Ratio ketergantungan (*Burden Dependence Ratio*) yaitu perbandingan penduduk yang belum produktif dan tidakproduktif. Angka BDR menunjukkan angkut 53,19% artinya bahwa setiap setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kalurahan Sidorejo harus menanggung 53-54 orang penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan yang lebih rendah merupakan hal yang ideal karena berarti berkurangnya beban pada tenaga kerja dalam kehidupan mereka yang tidak bekerja.

Usia produktif secara langsung akan mempengaruhi kegiatan sektor pertanian. Pada umumnya, usia produktif mempunyai kondisi fisik yang kuat dan

masih memiliki keinginan untuk meningkatkan ketrampilan. Penduduk yang masih dalam usia produktif akan lebih giat dalam mengelola usahatani mulai dari proses pembibitan hingga pasca panen. Namun, masih terdapat penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun masih melakukan kegiatan pertanian. Padahal, usia lebih dari 65 tahun sudah termasuk usia tidak produktif. Alasan penduduk tetap menjalankan usaha tani disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk menentukan juga kualitas tenaga kerja pada suatu wilayah. Pendidikan dalam sektor pertanian menjadi pondasi dalam usahatani. Tinggi rendahnya pendidikan petani akan berpengaruh terhadap penerimaan inovasi baru untuk meningkatkan produksi maupun taraf hidup. Pendidikan juga mencirikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan kemajuan suatu daerah.



Grafik 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Sidorejo

Tingkat pendidikan masyarakat di Sidorejo masih rendah, dengan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamat SD dan tidak/belum sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kalurahan Sidorejo untuk mendorong masyarakat agar melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi. Berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan beasiswa yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi pendorong agar masyarakat Sidorejo tidak lagi takut akan biaya pendidikan putra putrinya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan masyarakat dapat mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih luas.

3. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Tabel Potensi Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Sidorejo

No	Kategori	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Transportasi	Jembatan	4 buah
		Jalan Pemukiman (Cor/Beton)	5 km
		Jalan Pemukiman (Tanah/batu)	3 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Aspal)	1 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Cor/Beton)	5 km
		Jalan Desa/Kelurahan (Tanah/batu)	2,5 km
		Jalan Kabupaten/Kota (Aspal)	8 km
		Jalan Kabupaten/Kota (Batu)	4,5 km
		Jalan Negara	4,5 km

2	Pendidikan	Lembaga Pendidikan Agama (Ponpes)	1
		Gedung Tempat Bermain Anak	9
		Gedung TK	7
		Gedung SD/ sederajat	6
		Gedung SMP/ sederajat	1
3	Peribadatan	Masjid	20
		Mushola	4
		Gereja	1
		Kapel	1
4	Kesehatan	Posyandu	19
		Pustu	2
		Bidan	2
		Perawat	19
5	Irigasi	Saluran Primer	1 km
		Saluran Sekunder	2 km
		Saluran Tersier	3 km
		Bendungan	1 buah
		Sumur bor	9 unit
		Sumur Irpom	11 unit
		Telaga	3 buah
		Bendungan	1 buah
6	Air Bersih dan Sanitari	Sumur	1460 KK
		Sumur pompa	141 KK
		PAM	1151 KK
		SPAL	150 KK
		Jamban Sendiri	2344 KK
		Jamban bersama	466 KK
7	Olah-raga	Lapangan Sepak Bola	1
		Lapangan Voli	13

4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Sidorejo tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan, program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sebagai salah satu Kalurahan Rintisan Budaya sejak tahun 2022, Kalurahan Sidorejo senantiasa selalu melesatarikan lima aspek budaya yang ada di Sidorejo. Berikut adalah daftar potensi kebudayaan yang di bagi dalam lima aspek kebudayaan yang masih ada dan di lestarikan di Sidorejo.

Tabel Daftar Potensi Kebudayaan di Kalurahan Sidorejo

No	Aspek Budaya	Rincian
1	Adat & Tradisi	Bersih Dusun/ Rasulan
		Nyadran "Sewu Ingkung"
		Suran
		Muludan/Maulid Nabi

		Gumbregan
		Selikuran
		Ruwahan
		Badhan
		Bersih Resan
		Bersih Luweng/Kirim Dowo
		Tradisi Pernikahan
		Tradisi Kehamilan : Nglimani, Mitoni/Tingkep
		Tradisi Kematian
2	Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Jamu gendong "Sido Waras"
		Sego Berkat Yu Kasmi
		Kerajinan Pandai Besi
		Kerajinan Perak Gunungkrambil
		Kerajinan Batu Alam Pak Rakino
		Kerajinan Batu Alam Pak Susilo
		Kerajinan Batu Alam Pak Triman
		Kerajinan Bambu
		Kerajinan jaranan
3	Penataan Ruang, Bangunan dan Warisan Budaya	Rumah Tradisional Suwardi
		Petilasan Makam Eyang Suseco Ludiro
		Bangunan Balai Kalurahan Sidorejo
		Marangi
		Petilasan Nyi Trengguno
		Artefak Yoni
		Papan Sangatan
		Tugu Gunung Pare
		Gotong Royong Bersih Lingkungan
		Sambatan
4	Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa	Carita Berdirinya Trengguno
		Carita Dusun Blarangan (Ki Suseco Ludiro)
		Carita Cupu Wangi Murid Sunan Ampel yaitu So Ikromo
5	Kesenian dan Permainan Tradisional	Kerawitan
		Kethoprak
		Doger
		Reog dan jathilan
		Gejog Lesung
		Tari,Teater
		Jathilan
		Rebana
		Sholawat
		Sunda Manda/Engklek
		Gobak Slodor
		Egrang

b. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi Kalurahan pada awal kami menjabat, yakni akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 dapat kami sampaikan bahwa secara makro, pertumbuhan ekonomi Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2018 hingga 2026 bergerak selaras dengan tren ekonomi regional Kabupaten Gunungkidul. Meskipun otoritas statistik (BPS) tidak merilis angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khusus tingkat desa/kalurahan, indikator ekonomi Sidorejo dapat dianalisis melalui fluktuasi pertumbuhan ekonomi makro Gunungkidul, program ketahanan pangan desa, serta penguatan sektor UMKM kerakyatan.

Periode 2018–2019 ekonomi bergerak positif di kisaran 5,0% hingga 5,1%, didorong oleh sektor pertanian lahan kering, peternakan, serta kontribusi industri kerajinan batu ukir dan pertambangan batu kapur. Tahun 2020 kontraksi akibat pandemi pertumbuhan ekonomi anjlok ke zona negatif. Pandemi COVID-19 sangat memukul aktivitas pasar tradisional, menahan laju mobilitas komoditas pertanian, dan membatasi operasional UMKM lokal.

Periode 2021–2024 adalah masa pemulihan dan rebound, perekonomian kawasan bangkit secara masif. Laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul tercatat sebesar 5,31% (2021), 5,34% (2022), 5,04% (2023), dan melandai sehat ke angka 4,81% (2024). Sektor pertanian lokal, konstruksi, dan pengolahan hasil bumi kembali bergerak. Sejalan dengan rebound ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pascapandemi, pemerintah kalurahan mulai berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kalurahan mulai merancang kemandirian ekonomi melalui optimalisasi yang menyasar pengelolaan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Memasuki pertengahan tahun 2026, iklim ekonomi bergerak sangat impresif. Berdasarkan evaluasi kendali pembangunan triwulan I tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi melompat ke angka 5,47%. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul untuk tahun 2026 juga dinaikkan sebesar 5,93% menjadi Rp2.468.378 demi memperkuat daya beli masyarakat.

Di tingkat pemerintahan desa, dinamika perputaran ekonomi ditopang oleh beberapa kebijakan dan potensi lokal strategis:

1. Program Ketahanan Pangan Desa: Pemerintah Kalurahan Sidorejo memaksimalkan realisasi fisik dan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan. Hingga tahun anggaran berjalan, tata kelola lahan pangan ini terus dimonitor oleh Kapanewon Ponjong agar menjadi pilar mandiri bagi ekonomi warga.
2. Optimalisasi BUMKal Lokajaya: Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Lokajaya berperan aktif sebagai motor penggerak bisnis desa, mengelola modal usaha, serta menyalurkan hasil ketahanan pangan ke sektor produktif.
3. Penguatan Struktur UMKM Kerajinan: Sektor kerajinan batu ukir dari wilayah kalurahan Sidorejo terus mendapat intervensi promosi dan peningkatan kapasitas manajemen usaha pemula dari lembaga akademik. Hal ini berkontribusi menjaga serapan tenaga kerja non-pertanian.
4. APBKAL 2026 Berkelanjutan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sidorejo tahun anggaran 2026 dirancang untuk menggenjot program padat karya guna memperbaiki infrastruktur lingkungan sekaligus memberikan pendapatan tunai langsung bagi warga miskin.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

2.1. VISI DAN MISI

a. VISI KALURAHAN SIDOREJO

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Penyusunan Visi Kalurahan Sidorejo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Sidorejo seperti Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kalurahan dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Kalurahan seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kapanewon. Berdasarkan pertimbangan di atas Visi Kalurahan Sidorejo adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kalurahan Sidorejo yang maju, makmur, berbudaya, tenteram, religius, dan berkeadilan”

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

b. MISI KALURAHAN

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kalurahan agar tercapainya visi Kalurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat diimplementasikan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Sidorejo, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kalurahan Sidorejo adalah:

1. Melanjutkan program program terbaik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Sidorejo periode lalu.
2. Melaksanakan Program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga Instansi Pemerintah lainnya. Misal: PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), Bedah Rumah, dan Jambanisasi
3. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi:
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; dan
 - d. Pemberdayaan Kebudayaan
4. Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Sidorejo yang Maju, Makmur, Berbudaya, Tenteram, Religius, dan Berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip prinsip, yaitu:
 - a. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
 - b. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul; dan
 - c. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum
5. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Sidorejo, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel

- b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : cepat, tepat dan benar; dan
 - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesimbangan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
6. Memberikan dukungan terhadap kegiatan olah raga, kepemudaan, keagamaan dan kepercayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KALURAHAN

Srategi pembangunan Kalurahan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan Kalurahan, prinsip–prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan Kalurahan kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka pemerintahan kalurahan menempuh stategi sebagai berikut:

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Pemberdayaan dan pengembagan BUMKal dengan penyertaan modal untuk peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan dan meningkatkan PAD Kalurahan	• Penyertaan Modal BUMKAL untuk usaha Ketahanan Pangan dan usaha keuangan • Peningkatan Kapasitas BUMKal
2.	Peningkatan Kapasitas Pamong dan Lembaga untuk meningkatkan tertib administrasi dan displin kerja	• Pelatihan dan peningkatan kapasitas Lurah, Perangkat Kalurahan dan BPD • Penerapan prinsip-prinsip budaya pemerintahan
3.	Pembangunan dan Rehab Infrastruktur Kalurahan	Pembangunan, pemeliharaan sarana prasaran yang ada di kalurahan seperti jalan desa, jalan pemukiman, jalan usaha tani, talud, jembatan, saluran irigasi, dll.
4.	Peningkatan kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting	• Pemberian PMT bagi Balita dan Bumil • Sosialisasi dan edukasi • Pemberian insentif kader • Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader • Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan kesehatan mayarakat kalurahan.
5.	Meningkatkan taraf hidup sehat bagi warga yang kurang mampu	• Pemberian stimulan jamban dan BLT DD • Pemberian bantuan bibit ternak
6.	Meningkakan mutu pelayanan kepada masyarakat	• Pemeliharaan gedung/sarana prasana kalurahan dan pengadaan peralatan kerja • Penilaian kepuasan masyarakat dengan SKM
7.	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan meningkaykan angka	• Pemberian dukungan PAUD dengan pemberian insentif bagi pendidik

	partisipasi sekolah	PAUD • Pemberian fasilitas sarana prasaran PAUD • Pembangunan Gedung PAUD • Fasillitasi penyuluhan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat • Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di kalurahan • Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
--	---------------------	---

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
 - Pangan/pertanian;
 - Sandang;
 - Papan;
 - Pendidikan; dan
 - Kesehatan.
- Pemberdayaan masyarakat,*yang meliputi:*
 - Peningkatan Kapasitas aparatur pamong kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Bamuskal);
 - Penguatan kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana);
 - Pelatihan bagi UMKM;
 - Pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Linmas);
 - Peningkatan kapasitas BUMKal;
 - Pembinaan dan pelatihan Gapoktan;
 - Pelestarian adat dan budaya;
- Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

b. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Kalurahan Sidorejo diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Kalurahan Sidorejo dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Kalurahan Sidorejo berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*

- Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
- Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,sasaran, sumber

pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.
 - a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
 - b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran;

Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat harusla mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bag masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

c. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN SIDOREJO

Sumber pendapatan Kalurahan Sidorejo meliputi Pendapatan Asli Kalurahan, bagian dana perimbangan (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran Pendapatan Kalurahan Sidorejo diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan Kalurahan dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan Kalurahan strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan Kalurahan;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Kalurahan;
3. Optimalisasi pendapatan Kalurahan melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi Kalurahan.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Kalurahan Sidorejo dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Usaha Kalurahan melalui BUMKAL;
2. Pengelolaan Kios Desa;
3. Hasil Pungutan Kalurahan;
4. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah;
5. Bantuan Keuangan Provinsi;
6. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
7. Bantuan/Hibah Pihak Ketiga; dan
8. CSR Perusahaan yang ada di Kalurahan.

d. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN

Diberikannya kewenangan yang luas kepada kalurahan berupa otonomikalurahan, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kalurahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja kalurahan didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja kalurahan dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN

a. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Kalurahan Sidorejo selalu menargetkan Pendapatan Kalurahan akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan Kalurahan yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Kalurahan, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Kalurahan masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBKalurahan Kalurahan Sidorejo masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Sidorejo periode 2019 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1) Target dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun 2019-2026

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Kalurahan	2019	2.261.590.750,00	2.211.835.891,00	97,80%
2.		2020	2.461.654.500,00	2.431.696.826,00	97,80%
3.		2021	2.890.530.750,00	2.869.526.598,00	99,27%
4.		2022	3.479.546.300,00	3.477.617.052,00	99,94%
5.		2023	4.179.112.900,00	4.174.948.970,00	99,90%
6.		2024	3.299.928.600,00	3.275.094.359,00	99,25%
7.		2025	3.299.896.800,00	3.292.331.074,00	99,77%
8.		2026 *)	2.232.290.800,00	1.122.831.282,00	50,30%

2) RincianTarget danRealisasi Pendapatan selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	204.270.000,00	166.514.991,00	81,52%
2.	Dana Desa (DD)	1.177.779.000,00	1.177.779.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	774.917.000,00	774.917.000,00	100,00%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	69.590.700,00	69.590.700,00	100,00%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	0,00	0,00	0,00%
6.	BKK Kabupaten	0,00	0,00	0,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	35.034.050,00	23.034.050,00	65,75%
JUMLAH		2.261.590.750,00	2.211.835.891,00	97,80%

b. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	103.620.000,00	84.950.000,00	81,98%
2.	Dana Desa (DD)	1.243.320.000,00	1.243.320.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	912.439.000,00	912.439.000,00	100,00%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	58.575.500,00	58.602.500,00	100,05%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	0,00	0,00	0,00%
6.	BKK Kabupaten	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	23.700.000,00	12.385.326,00	52,26%
JUMLAH		2.461.654.500,00	2.431.696.826,00	98,78%

c. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	329.551.350,00	315.674.350	95,89%
2.	Dana Desa (DD)	1.218.572.000,00	1.218.572.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	965.658.500,00	962.204.120,00	99,64%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	66.648.900,00	64.661.000,00	97,02%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
6.	BKK Kabupaten	247.200.000,00	247.200.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	12.900.000,00	11.215.128,00	86,94%
JUMLAH		2.890.530.750,00	2.869.526.598,00	99,27%

d. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	43.750.000,00	29.510.000,00	67,45%
2.	Dana Desa (DD)	1.244.093.000,00	1.244.093.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	974.424.400,00	967.589.440,00	99,30%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	67.285.400,00	87.746.700,00	130,41%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00%
6.	BKK Kabupaten	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	24.993.500,00	23.677.912,00	94,74%
JUMLAH		3.479.546.300,00	3.477.617.052,00	99,94%

e. Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	9.000.000,00	7.300.000,00	81,11%

2.	Dana Desa (DD)	2.069.226.000,00	2.069.226.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.056.264.100,00	1.048.748.750,00	99,29%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	91.812.800,00	93.588.400,00	101,93%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
6.	BKK Kabupaten	535.310.000,00	535.310.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	117.500.000,00	120.775.820,00	102,79%
JUMLAH		4.179.112.900,00	4.174.948.970,00	99,90%

f. Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	41.150.000,00	33.154.095,00	80,57%
2.	Dana Desa (DD)	1.806.628.000,00	1.806.628.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.132.913.600,00	1.125.010.100,00	99,30%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	95.837.000,00	95.837.000,00	100,00%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	0,00	0,00	0,00%
6.	BKK Kabupaten	199.000.000,00	199.000.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	24.400.000,00	15.465.164,00	63,38%
JUMLAH		3.299.928.600,00	3.275.094.359,00	99,25%

g. Tahun 2025

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	158.855.000,00	158.570.000,00	99,82%
2.	Dana Desa (DD)	1.571.890.000,00	1.571.890.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.165.661.000,00	1.157.941.850,00	99,34%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	160.041.800,00	160.041.800,00	100,00%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
6.	BKK Kabupaten	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	69.949.000,00	70.387.424,00	100,63%
JUMLAH		3.299.896.800,00	3.292.331.074,00	99,77%

h. Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei 2026

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)	31.113.000,00	7.684.000,00	24,70%
2.	Dana Desa (DD)	373.456.000,00	373.456.000,00	100,00%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.166.456.000,00	482.561.020,00	41,37%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	143.867.300,00	71.933.650,00	50,00%
5.	BKK Provinsi/Pemda DIY	295.000.000,00	175.000.000,00	59,32%
6.	BKK Kabupaten	157.949.500,00	0,00	0,00%
7.	Pendapatan Lain-lain	64.449.000,00	12.196.612,00	18,92%
JUMLAH		2.232.290.800,00	1.122.831.282,00	50,30%

b. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1) Permasalahan :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan yang masih rendah
- b. Realisasi pada tahun 2026 belum genap satu tahun anggaran
- c. Tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah
- d. Pengelolaan Aset yang belum optimal
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang kurang optimal
- f. Kurangnya pemahaman pamong kalurahan mengenai tata kelola keuangan digital, transparansi, serta akuntabilitas.
- g. Kurangnya koordinasi antar lurah, pamong dan lembaga sehingga informasi dan permasalahan kurang tersampaikan.

2) Penyelesaian :

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Kalurahan, dengan pengelolaan aset kalurahan yang lebih baik
- b. Memperbaiki sistem pengelolaan aset kalurahan dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
- c. Pengembangan Pasar Desa untuk peningkatan perekonomian warga dan pendapatan asli kalurahan.
- d. Peningkatan kapasitas pamong kalurahan untuk meningkatkan kemampuan tata kelola keuangan digital yang transparan serta akuntabel.
- e. Revitalisasi BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan)
 - (1) Memfokuskan lini bisnis BUMKal pada sektor riil yang dibutuhkan warga, seperti agen pembayaran listrik/pajak, penyalur pupuk resmi, atau pengelolaan sampah mandiri.
 - (2) Merekrut pengelola BUMKal dari unsur masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha, bukan sekadar penunjukan kedekatan dengan pamong.
 - (3) Memberikan modal APBKal hanya kepada BUMKal yang memiliki rencana bisnis (business plan) yang jelas dan rasional.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN

a. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN KALURAHAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengisyaratkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Kalurahan atau desa di Kabupaten Gunungkidul pun demikian.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Kalurahan Sidorejo bersama unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Kalurahan Sidorejo.

b. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Kalurahan kurun waktu 2019 s/d. Tahun 2026 sebesar Rp. 27.317.528.147,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 23.018.577.891,26 (dua puluh tiga miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma dua puluh enam rupiah) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Kalurahan Tahun 2019 – 2026

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Kalurahan	2019	2.268.053.074,00	2.214.845.808,00	97,65%
2.		2020	2.905.819.326,00	2.214.845.808,47	76,22%
3.		2021	5.811.638.652,00	4.429.691.616,94	76,22%
4.		2022	3.528.967.821,00	3.484.560.302,00	98,74%
5.		2023	4.016.591.171,00	3.917.753.401,00	97,54%
6.		2024	3.344.602.440,00	3.244.954.235,00	97,02%
7.		2025	3.074.910.764,00	2.912.691.839,00	94,72%
8.		2026	2.366.944.899,00	599.234.880,86	25,32%

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.011.399.803,00	970.918.537,00	96,00%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.013.121.300,00	1.012.470.300,00	99,94%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	72.474.271,00	72.399.271,00	99,90%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	167.057.700,00	167.057.700,00	100,00%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00%
JUMLAH		2.268.053.074,00	2.224.845.808,00	98,09%

b. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.114.849.307,00	1.070.319.505,00	96,01%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	632.759.150,00	621.566.875,00	98,23%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	12.675.000,00	12.675.000,00	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100.608.000,00	93.058.000,00	92,50%
5.	Belanja Penanggulangan,	599.684.000,00	598.184.000,00	99,75%

	Bencana Darurat dan Mendesak Desa			
JUMLAH		2.460.575.457,00	2.395.803.380,00	97,37%

c. Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.383.360.100,00	1.361.305.930,00	98,41%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	930.197.275,00	926.547.275,00	99,61%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	84.325.000,00	82.325.000,00	97,63%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	3.997.000,00	3.997.000,00	100,00%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	500.656.000,00	497.834.775,00	99,44%
JUMLAH		2.902.535.375,00	2.872.009.980,00	98,95%

d. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.147.755.496,00	1.129.949.243,00	98,45%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.725.172.810,00	1.706.559.459,00	98,92%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	68.559.325,00	61.421.600,00	89,59%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	43.930.000,00	43.730.000,00	99,54%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	543.550.190,00	542.900.000,00	99,88%
JUMLAH		3.528.967.821,00	3.484.560.302,00	98,74%

e. Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.376.456.908,00	1.303.373.950,00	94,69%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.846.262.351,00	1.840.605.651,00	99,69%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	48.193.912,00	47.303.800,00	98,15%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	520.765.000,00	517.670.000,00	99,41%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	224.913.000,00	208.800.000,00	92,84%
JUMLAH		4.016.591.171,00	3.917.753.401,00	97,54%

f. Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.459.099.010,00	1.434.746.606,00	98,33%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.230.602.000,00	1.187.735.615,00	96,52%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	28.750.840,00	28.750.840,00	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	485.350.590,00	454.921.174,00	93,73%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	140.800.000,00	138.800.000,00	98,58%
JUMLAH		3.344.602.440,00	3.244.954.235,00	97,02%

g. Tahun 2025

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.562.302.664,00	1.489.573.739,00	95,34%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.217.480.000,00	1.131.990.000,00	92,98%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	92.099.600,00	92.099.600,00	100,00%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	62.228.500,00	62.228.500,00	100,00%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	140.800.000,00	136.800.000,00	97,16%
JUMLAH		3.074.910.764,00	2.912.691.839,00	94,72%

h. Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei 2026

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.513.459.183,00	466.775.144,86	30,84%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	635.541.741,00	61.047.500,00	9,61%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	106.796.236,00	54.312.236,00	50,86%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	40.774.000,00	0,00	0,00%
5.	Belanja Penanggulangan, Bencana Darurat dan Mendesak Desa	70.373.739,00	17.100.000,00	24,30%
JUMLAH		2.366.944.899,00	599.234.880,86	25,32%

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Juni.

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Lurah periode 2019- 2026

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1.	Pembiayaan Kalurahan	2019	19.021.374,00	0,00	
2.		2020	16.011.457,00	0,00	
3.		2021	51.904.903,00	0,00	
4.		2022	4.942.121,00	0,00	
5.		2023	42.478.271,00	205.000.000,00	
6.		2024	94.673.840,00	50.000.000,00	
7.		2025	124.813.964,00	349.800.000,00	
8.		2026	154.653.190,00	20.000.000,00	

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Pamong Kalurahan.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung baru sampai bulan Mei 2026, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan.

Belanja pemberdayaan yang minim, dimana alokasi untuk sektor pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemuda/UMKM porsinya sangat kecil dibandingkan dengan proyek fisik infrastruktur. Solusinya adalah dengan mengalihkan anggaran infrastruktur makro yang kurang mendesak ke program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja digital untuk pemuda, modal awal UMKM, atau ketahanan pangan lokal.

Ketergantungan porsi dana transfer seperti Dana Desa, sehingga ketika terjadi pemotongan atau keterlambatan penyaluran Dana Desa dari pusat, ruang fiskal belanja kalurahan langsung lumpuh karena tidak memiliki bantalan anggaran mandiri. Penggunaan belanja Dana Desa juga ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga program yang menjadi prioritas kalurahan sendiri tidak dapat terakomodasi.

Perencanaan kurang matang sehingga belanja fisik sering kali gagal dieksekusi tepat waktu karena kendala teknis lapangan atau lambatnya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penyerapan menumpuk di akhir tahun karena karena keterlambatan pencairan dana transfer sehingga kalurahan baru membelanjakan anggaran secara masif menjelang kuartal keempat, memicu risiko pelaksanaan proyek terburu-buru dan kurang maksimal. Penyelesaian dari masalah ini adalah dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis proyek fisik di awal tahun (Kuartal I) agar eksekusi belanja tidak menumpuk di akhir tahun. Selain ini juga membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dan membagi target penyerapan belanja ke dalam empat kuartal secara proporsional dan tegas, sehingga kendala lapangan bisa terdeteksi lebih cepat. Mengadakan rapat koordinasi bulanan antara Lurah, Carik, Danarta, dan Pelaksana Teknis untuk memantau program yang serapannya macet.

SPJ (Surat Pertanggungjawaban) rumit membuat pamong kalurahan sering terjebak dalam beban administrasi penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja, sehingga mengurangi fokus pada mutu fisik program di lapangan. Penyelesaian masalah ini adalah dengan pemberdayaan Staf Kalurahan dan Tim/TPK. Staf Kalurahan harus ditertibkan sehingga dapat membantu pelaksana teknis. Optimalisasi Tim/TPK, hal ini membuat Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bisa fokus pelaksanaan pembangunan atau efektivitas pelatihan warga tanpa terbebani dengan urusan administrasi.

Kurangnya sistem pengendalian internal yang ketat memicu celah penyelewengan dana belanja. Solusinya adalah penerapatan transaksi belanja barang dan jasa di atas

nominal tertentu menggunakan sistem transfer nontunai (CMS Desa) guna meminimalkan risiko penyelewengan tunai dan mempermudah audit. Optimalisasi peran Bamuskal juga diperlukan dengan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) melalui pelatihan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) agar fungsi pengawasan mereka berjalan tajam dan objektif.

Penentuan harga satuan barang dan jasa dalam RAB yang melampaui atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa sehingga terjadi pemborosan anggaran. Untuk itu perlu menyinkronkan sistem penganggaran kalurahan dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Barang dan Jasa untuk menghindari penggelembungan dana (*mark-up*).

BAB IV

CAPAIAN PROGRAM

4.1. Capaian Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa/Kalurahan	5	11	10	8	10	5	8	1
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa/Lurah	0	-	-	1	-	-	-	-
		c. Peraturan Kepala Desa/ Lurah	2	7	6	7	8	6	11	2
		d. Keputusan Kepala Desa/Lurah	40	27	28	2	21	25	38	12
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:								
		1) Laki-laki	4.814	4.830	4.823	4.792	4.812	4.605	4.815	4.815
		2) Perempuan	4.808	4.778	4.793	4.828	4.831	4.638	4.846	4.846
		3) Jumlah Kepala Keluarga	3.116	3.174	3.178	3.263	3.297	3.097	3.322	3.322
		4) Jumlah Anggota Keluarga	6.506	6.434	6.438	6.357	6.346	6.146	6.339	6.339
		5) Jumlah Jiwa	9.622	9.608	9.616	9.620	9.643	9.243	9.661	9.661
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:								
		1) Pendidikan Umum	6.530	6.534	6.541	6.550	6.638	6.239	6.658	6.658
		2) Pendidikan Khusus	11	16	14	5	5	4	3	3
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:								
3.	Pertanahan.	1) PNS	33	32	32	54	54	53	54	54
		2) TNI	5	5	5	5	5	5	4	4
		3) Swasta	323	355	365	657	662	670	685	685
		a. Status Tanah:								
		1) Sertifikat Hak Milik	2615	7.000	10.000	10.000	12.500	13.708	13.708	13.708
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha		-	-	-	-	-	-	-
		3) Sertifikat Hak Pakai		149	149	149	149	149	149	149
		b. Luas Tanah:								

		1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	652,1 ha 652,1 ha 112,22 ha	652,1 ha 652,1 ha 112,22 ha	652,1 ha 652,1 ha 112,22 ha	652,1 ha 652,1 ha 112,22 ha	852,1 ha 472,1 ha 112,22 ha	1.052,1 ha 381,1 ha 112,22 ha	1.052,1 ha 381,1 ha 112,22 ha	1.052,1 ha 381,1 ha 112,22 ha
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	42,5 ha 908,2 ha 10,7 ha 385,3 ha	42,5 ha 908,2 ha 10,7 ha 385,3 ha	42,5 ha 908,2 ha 10,7 ha 385,3 ha	42,5 ha 908,2 ha 10,7 ha 385,3 ha	42,5 ha 908,2 ha 10,7 ha 385,3 ha	50 ha 900,2 ha 10,7 ha 380,3 ha 5 ha	50 ha 900,2 ha 10,7 ha 380,3 ha 5 ha	50 ha 900,2 ha 10,7 ha 380,3 ha 5 ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan	29	28	29	29	29	27	29	29
		b. Jumlah Anggota BPD	11	8	9	9	9	9	9	9
		c. Musyawarah Desa/Kalurahan	1 kali	4 kali	3 kali	3 kali	4 kali	3 kali	4 kali	-
		d. Musrengbangdes	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-
		e. Musyawarah BPD	8 kali	4 kali	3 kali	3 kali	4 kali	3 kali	14 kali	1
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip/Linmas 1) Jumlah Anggota	1 kali 70 orang	1 kali 50	2 kali 38	2 kali 38	1 kali 50	2 kali 50	1 kali 66	1 kali 66
		2) Alat Pemadam kebakaran		-	-	-	-	-	-	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	1 orang	-	-	-	-	-	-	20
		b. Ketentraman dan Ketertiban:								
		1) Jumlah Kejadian kriminal		-	-	-	-	-	-	-
		2) Jumlah Bencana Alam	2 lokasi	-	-	-	-	-	-	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban		-	1	1	-	1	1	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	59 lokasi	70	70	70	70	70	70	70
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-	-	-	-	-	-	-	-
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Jumlah RT/RW 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada	90/19 Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat -	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

		Ya/Tidak								
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

4.2. Capaian Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	21 km	25 km	30 km	30 km	33 km	52 km	54 km	54 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	36 km	38 km	40 km	40 km	42 km	42 km	42 km	42 km
		c. Jalan Provinsi (Km)	2 km	4 km	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km
		d. Jalan Negara (Km)	5 km	6 km	8 km	8 km	8 km	8 km	8 km	8 km
		e. Jembatan (Buah)	15	16	17	17	17	18	18	18
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum								
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	9	9	9	9	9	9	9	9
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	7	7	7	7	7	7	7	7
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	7	7	7	7	7	7	8	8
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	1	1	1	1	1	1	2	2
		5). Akademi (Jumlah)		-	-	-	-	-	-	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)								
		b. Tempat Pendidikan Khusus								
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1	1	1	1	1	1	1	1
		2). Madrasah (Jumlah)								

		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)						1	1	0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	3 - - - - - -	3 - - - - - -	3 - - - - - -	3 - - - - - -	3 - - - - - -	3 - - - - - -	3 - - - - - -	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	- 1 6 25 - - -	- 1 10 30 - - -	- 1 13 35 - - -	- 1 13 35 - - -	- 1 13 35 - - 2	- 1 13 35 - - 2	- 1 15 40 - - 2	- 1 15 40 - - 2

4.3. Capaian Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	-	-	-	-	2 kali	1 kali	1 kali	-
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah								
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa	-	7 kali	8 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa								
		1) Sosialisasi Peraturan Desa	12 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa					1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat)	-	-	2	-	2 kali	-	-	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	4 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan	1 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

		ketertiban masyarakat								
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	12 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	1 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	23	23	24	24	24	24	24	24
		b. Majelis gereja (Jumlah)	2	2	2	2	2	2	2	2
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	19	19	19	19	19	19	19	19
		f. Remaja Gereja (jumlah)	1	1	1	1	1	1	1	1
		g. Remaja Budha (Jumlah)					-	-	-	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)					-	-	-	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)					-	-	-	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)					1	1	1	1

4.4. Capaian Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2 kali	-	3 kali	3 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1 kali	2 kali	5 kali	1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1 kali	-	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1 kali	1 kali	5 kali	1 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	9kali	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3 kali	5 kali	15 kali	5 kali	4 kali	5 kali	4 kali	2 kali

BAB V

RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN

Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, program kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Bulan November Tahun 2026. Kegiatan diantaranya sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
1	Muskal	Juli - Agustus	Pangripta
2	Musrenbangkal	Agustus - September	Pangripta
3	Penyusunan RPKKal	Agustus - September	Pangripta
4	Perubahan APBKal	Agustus - Oktober	Pangripta
5	Perubahan Baliho APBKal	Agustus - Oktober	Pangripta
6	Penyusunan APBKal	November	Pangipta
7	Pelaksanaan Pilur	Juni - September	Jagabaya
8	Insentif RT/RW	Juli - November	Jagabaya
9	BPJS KT RT RW		
10	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Juli - Agustus	Jagabya
11	Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Juli - Agustus	Jagabaya
12	Intensifikasi Pemungutan Pajak/PBB	Juli - September	Jagabaya
13	Cor Rabat Beton Jalan Prioritas Bolodukuh Kidul - Trengguno	Juli - Agustus	Ulu – Ulu
14	Padat Karya Dana Keistimewaan	Juli- Agustus	Ulu – Ulu
15	Jalut Tegalrejo	Juli – Agustus	Ulu – Ulu
16	Gelar Potensi	September	Ulu – Ulu
17	Ziarah Makam Pahlawan	17 Agustus	Ulu – Ulu
18	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Juni dan November	Ulu – Ulu
19	Peningkatan Kapasitas BUMKal	Agustus - September	Ulu – Ulu
20	Drainase Karya Bhakti TNI	September - Oktober	Ulu – Ulu
21	Pemeliharaan Jalan dan Talud Dadap	September - Oktober	Ulu – Ulu
22	Honor SID	Juli - November	Kamituwa
23	Langganan Iconet	Juli – November	
24	Pemuthakiran IDM	Juni – September	Kamituwa
25	Honor Pendidik PAUD	Juli – November	Kamituwa
26	Laptop PAUD	Juli – September	Kamituwa

27	PMT Bumil	Juli – November	Kamituwa
28	Rembug Stunting	Juli	Kamituwa
29	Honor eHDW	Juli – November	Kamituwa
30	PMT Balita	Juli – November	Kamituwa
31	Insentif Kader	Juli – November	Kamituwa
32	Stimulan Jamban Sehat	Juli – Oktober	Kamituwa
33	Operasional Karang Taruna	Agustus – Oktober	Kamituwa
34	Optimalisasi TKPKD	Agustus - Oktober	Kamituwa
35	Operasional LPMKal	Agustus - Oktober	Kamituwa
36	Operasional PKK	Agustus – September	Kamituwa
37	BLT	Juni – November	Kamituwa
38	Siltap Pamong	Juli - November	Tata Laksana
39	BPJS KT Lurah	Juli - November	Tata Laksana
40	BPJS KT Pamong	Juli - November	Tata Laksana
41	BPJS Kesehatan Staf	Juli - November	Tata Laksana
42	Operasional Pemerintah Desa	Juli - November	Tata Laksana
43	Tunjangan Bamuskal	Juli - November	Tata Laksana
44	BPJS Bamusal	Juli - November	Tata Laksana
45	Operasional Bamuskal	Juli - November	Tata Laksana
46	Biaya Operasional Desa	Juli - November	Tata Laksana
47	Acara Seremonial	Juli - Oktober	Tata Laksana
48	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Juli - September	Tata Laksana
49	Servise Kendaraan Dinas	Juli - Oktober	Tata Laksana
50	Pajak Kendaraan Dinas	Juli - Agustus	Tata Laksana
51	Servise Printer/Laptop/Komputer	Juli - September	Tata Laksana
52	Survey Kepuasan Masyarakat	Juli - November	Tata Laksana
53	SPJ Bulanan/Semesteran	Juni dan November	Tata Laksana

BAB VI

PRESTASI

Selama kami menjabat sebagai Lurah selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan terdapat beberapa keberhasilan/prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Kalurahan Sidorejo yang sesuai visi “**Terwujudnya masyarakat Kalurahan Sidorejo yang maju, makmur, berbudaya, tenteram, religius, dan berkeadilan**”.

Keberhasilan/prestasi dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur Kalurahan seperti jalan desa, jalan pemukiman, jembatan, talud, drainase, jalan usaha tani dan bendungan.
- b. Penetapan Hari Jadi Kalurahan Sidorejo
- c. Menjadi Kalurahan Rintisan Budaya
- d. Membangun Gedung PAUD
- e. Membentuk BUMKal Lokajaya Sidorejo
- f. Membentuk Koperasi Desa Merah Putih
- g. Membangun Kios Desa
- h. Pembentukan Kaltana

6.1. INFRASTRUKTUR KALURAHAN

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Jalan Desa	3010	Meter	Sidorejo		2019-2025
2.	Pembangunan Jalan Pemukiman	9827	Meter	Sidorejo		2019-2025
3.	Pembangunan Jembatan	4	Titik	Asemlulang, Sambirejo, Trengguno Lor, Munggur Kulon		2019-2025
4.	Pembangunan Talud	2957,5	Meter	Sidorejo		2019-2025
5.	Pembangunan Jalut	5773	Meter	Sidorejo		2019-2025
6.	Pembangunan Bendungan	1	Paket	Bolodukuh Lor		2024
7.	Pembangunan Drainase	189	Meter	Tegalrejo, Munggur Kulon, Ngampel		2021-2023

6.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Menjadi Kalurahan Rintisan Budaya	1	Paket	Sidorejo		2022
2.	Penetapan Hari Jadi dan Sejarah Berdirinya Kalurahan Sidorejo	1	Paket	Sidorejo		2025
3.	Pembanguan Gedung PAUD	1	Paket	Ngampel		2022

6.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Kios Desa	8	Kios	Bolodukuh Kidul, Sumberwojo, Nongkosepet		2019, 2020, 2024
2	Pelatihan UMKM dan Pembentukan Kelompok UMKM	1	Kali	Sidorejo		2023

	"Sido Mandaya"					
3	Pembentukan BUMKal			Sidorejo		2021
4	Pembentukan KDMP			Sidorejo		2025

6.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pelatihan Batik	1	Kali	Balai Kalurahan Sidorejo		2025
2.	Pelatihan Sablon	1	Kali	Sidorejo		2025
3.	Pelatihan Olahan Makanan	2	Kali	Sidorejo		2025
4.	Pembentukan Kalurahan Tanggap Bencana (Kaltana)	1	kali	Sidorejo		2024

6.5. PRESTASI BIDANG LAINNYA

- Program PTSL dengan kuota :
 - Tahun 2019 : 700 Bidang
 - Tahun 2020 : 830 Bidang
 - Tahun 2021 : 2.220 Bidang
- Juara 3 atas Komitmen dan Dukungan Dalam Pengalokasian Anggaran Kalurahan Untuk Kegiatan di Bidang Kesehatan oleh UPT Puskesmas Ponjong I Tahun 2025

BAB VII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan(LPP Kalurahan) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Lurah untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Kalurahan. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan.

7.1 SARAN-SARAN

- Dari tahun ketahun Pemerintahan kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat perlu semakin bersinergi dan kompak dalam membangun Kalurahan Sidorejo baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan keuangan dari Pemerintah daerah sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- Sesuai program pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada Kalurahan maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan(LPP Kalurahan) akhir masa jabatan Lurah periode Tahun 2018-2026 ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sidorejo, 25 Juni 2026

Lurah Sidorejo

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

